

AYAT-AYAT POLITIK DALAM WACANA TAFSIR KIAIYI-SANTRI STUDI DI KOTA PALEMBANG

Oleh:

John Supriyanto

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

johnsupriyanto_uin@radenfatah.ac.id

Muhammad Noupal

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

muhammadnoupal_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This study examines how the discourse of interpretation from kiai-yi-santri in the city of Palembang about political verses in the Koran. It is very important to express the interpretation of the kiai-yi-santri, because of their quite special position in a society. From kiai-yi-santri, usually information about decisions of religious law, including their political views, also influences social and life dynamics in society. This research uses the hermeneutic method and the discourse analysis method to see how the discourse of interpretation from kiai-yi-santri about political verses in the Koran. With a sample of kiai-yi-santri randomly drawn from various boarding schools in the city of Palembang, it was concluded that their discourse of interpretation of political verses in the Koran, always characterized by contextual and normative. This is because the kiai-yi-santri always look at the political reality around them and the ideal values found in the Koran.

Keynote : *political verses, discourse of interpretation, kiai-yi-santri, contextualization*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana wacana tafsir kiai-yi-santri yang ada di kota Palembang tentang ayat-ayat politik yang ada di dalam al-Quran. Pemahaman kiai-yi-santri tersebut penting diungkap mengingat kedudukan mereka yang cukup istimewa di masyarakat. Dari kiai-yi-santri, biasanya informasi seputar putusan-putusan hukum agama, tidak terkecuali pandangan politik mereka turut mempengaruhi dinamika sosial dan kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutic dan analisis wacana untuk melihat bagaimana wacana tafsir kiai-yi-santri tentang ayat-ayat politik. Dengan sampel para kiai-yi-

santri yang diambil secara random dari berbagai pondok pesantren di kota Palembang didapati kesimpulan bahwa wacana tafsir mereka tentang ayat-ayat politik selalu bersifat kontekstual dan normative. Hal ini disebabkan karena kiayi-santri selalu melihat realitas politik di sekitarnya dan nilai-nilai ideal yang ada dalam al-Quran.

Kata kunci : *ayat-ayat politik, wacana tafsir, kiayi-santri, kontekstualisasi*

A. Pendahuluan

Fokus tulisan ini ingin mengkaji bagaimana wacana kiayi-santri terhadap ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang politik. Wacana tersebut menjadi sangat penting mengingat posisi kiayi-santri, khususnya di Indonesia, memiliki kedudukan yang sangat istimewa di masyarakat. Dari kiayi-santri, biasanya informasi seputar putusan-putusan hukum agama disampaikan. Bahkan dari mereka juga norma perilaku dan prinsip moral diterima dan dijalankan oleh masyarakat; tidak terkecuali pandangan tentang politik yang turut mempengaruhi dinamika sosial dan kehidupan masyarakat.

Posisi sentral kiayi-santri dalam kehidupan politik masyarakat, dengan sangat jelas kita dapat temukan pada kasus Ahok yang dianggap telah melecehkan agama. Kasus Ahok, dengan segala persoalan politik yang ada di dalamnya, kemudian menjadi lawan politik bagi kiayi-santri yang mendasari interpretasinya atas teks-teks al-Quran sebagai pandangan dan gerakannya. Bahkan melalui kasus Ahok inilah, politik Islam Indonesia saat itu mengarah kepada munculnya ulama-ulama atau kiayi-santri yang turut aktif dalam membela Islam.

Memang, sekalipun keikutsertaan kiayi-santri dalam politik praktis saat itu lebih banyak dalam bentuk pewacanaan; atau setidaknya dalam bentuk respon atas persoalan politik yang ada, hal ini menunjukkan bahwa kiayi-santri saat itu memiliki sikap politik karena didorong atas interpretasi mereka terhadap ayat-ayat al-Quran. Hal ini juga yang mendorong kajian-kajian atas ayat-ayat politik, seperti QS. al-Maidah; 51-53, sering disampaikan oleh kiayi-santri dalam dakwah dan pengajaran keagamaan mereka.

Menarik, kajian atas ayat-ayat politik yang dilakukan oleh kiayi-santri tidak mengarah pada satu pemahaman yang sama. Ada banyak tafsir—misalnya tentang QS. al-Maidah; 51—yang memuat kata ‘*auliya*’ yang diartikan bukan sebagai ‘pemimpin’ tetapi juga ‘kawan setia’.¹ Persoalan multi tafsir atas ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang politik inilah

¹ Misalnya dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka, disebutkan bahwa awliya berarti tolong menolong, bantu membantu dan pimpin memimpin dalam kekafiran orang yahudi dan nasrani. Lihat Hamka, *Tafsir al-*

yang kemudian menjadi pro dan kontra dari pandangan dan sikap politik para ulama atau kiayi. Kita dapat mencontohkan bagaimana Habib Rizieq yang berseberangan pandangannya dengan Buya Syafi'i Ma'arif; juga antara KH. Ishomuddin dengan Bachtiar Natsir. Bahkan di kalangan NU yang diwakili KH. Said Agil Siraj dengan Muhammadiyah melalui Amin Rais, perbedaan itu semakin memperlihatkan masing-masing perbedaan pandangan ulama atau kiayi-santri terhadap ayat-ayat politik.

Memang, di dalam al-Qur'an kita tidak menemukan kata 'politik' (dalam bahasa Arab disebut *siyasah*) dari akar kata *sasa - yasusu*. Tetapi tentu saja bukan berarti al-Quran tidak berbicara tentang politik. Istilah yang digunakan Al-Qur'an tentang politik secara sepintas ternyata dapat kita temukan pada ayat-ayat tentang "*hukm*"; yang pada awalnya berarti "menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan". Dari akar kata yang sama terbentuk pula kata '*hikmah*' yang pada mulanya berarti "kendali". Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-sais-siyasat*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.²

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata 'politik' diartikan sebagai "segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain." Juga dalam arti "kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah)."³ Secara etimologis, kata "politik" juga masih berhubungan dengan polisi atau kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.

Sedangkan politik secara terminologis dapat diartikan (1) menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan (*politics*). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik, hak-hak politik; (2) menunjuk kepada "satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai" atau "cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu". Lebih mengarah pada kebijakan (*policy*). Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik keuangan; dan 3) menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (*siyasah*).

Azhar vol. 3 hal. 32. Ibn Katsir juga mengartikan awliya sebagai kawan, lihat Muhammad Saed Abdurrahman; *Tafsir Ibn Katsir Part 6 of 30* (al-Nisa 148 to al-Maidah 081), h. 140.

² Dalam kamus al-Muhith, *saya-yasusu* pada kalimat "*sasa al-dawwaba*", berarti mengurus, melatih atau mendidik. Pengertian ini menunjukkan bahwa arti kata "*siyasah*" (politik) berimplikasi pada usaha untuk memberikan perhatian kepada masyarakat.

³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Mizan: Bandung, 1996), hal: 416

Di antara ketiga definisi tersebut, tentunya definisi pertama lebih memiliki konotasi negatif dibandingkan definisi kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan orientasi yang pertama adalah politik kekuasaan, untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dalam jalan apapun entah baik entah buruk, dapat menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit yang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi pada politik pelayanan terhadap masyarakat, dimana posisi pemimpin merupakan pelayan masyarakat bukan penguasa aset-aset strategis.

Pengertian politik dalam fiqih Islam menurut ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari'at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari'at.⁴

Fungsi politik dalam Islam bukanlah segala macam cara untuk memperoleh kekuasaan, tetapi bagaimana mengatur segala urusan rakyat dengan menyeluruh dan tuntas. Untuk mencapai itu semua, berbagai penjelasan di dalam Al-Qur'an harus diakui telah mengarahkan masalah politik dapat berfungsi secara maksimal. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat dilihat QS. An-Nisa yang mengatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu tidak lain adalah amanah dari Allah. Dalam *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi, disebutkan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan amanat yang telah dibebankan kepadanya dengan tidak melakukan kezaliman, adil dalam menegakan hukum, serta cerdas dalam mengelola keuangan Negara.⁵ Al-Quran juga mengenalkan prinsip musyawarah (QS. Ali Imran;159) sebagai prinsip yang sangat erat dengan sejarah politik di dunia Islam. Hal itu dapat terlihat dari pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat.⁶

Pesan-pesan seperti inilah yang akan diungkapkan melalui pemahaman para kiayi dan santri, khususnya tentang persoalan-persoalan politik yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana ayat-ayat politik yang terdapat dalam al-Quran; bagaimana ayat-ayat politik yang

⁴Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (LKiS, Yogyakarta. cet I 1994), hal. 209-210

⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Ar-Risalah, 2006), jilid 6, hal. 424

⁶ Lihat : Muhammad Rahmatullah, "Kepemimpinan Khalifah Abubakar al-Shiddiq", dalam *Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies*, vol. 4 No. 2 September 2014, hal. 197-204.

ada di dalam al-Quran dapat difahami dari wacana tafsir kiayi-santri; dan aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam wacana kiayi-santri tentang ayat-ayat politik yang ada dalam al-Quran.

Karena kajian ini ingin melihat bagaimana ayat-ayat politik yang ada di dalam al-Quran difahami oleh para kiayi dan santri, maka untuk mendapatkan jawaban tersebut diperlukan semacam kerangka umum yang menjadi landasan teoritis. Karena itu, penulis menggunakan dua teori; hermeneutik dan analisis wacana.

Hermeneutika dipakai sebagai proses pemahaman, penafsiran dan penerjemahan atas sebuah teks melalui tiga subjek yang terlibat, yaitu: dunia pengarang, dunia teks, dan dunia pembaca. Teks-teks keagamaan (baca; al-Quran) yang lahir dari sekian abad yang lalu di dunia Timur Tengah, ketika hadir di masyarakat Indonesia tentu saja merupakan sesuatu yang asing. Persoalan keterasingan inilah yang menjadi persoalan hermeneutika sebagai sebuah teori interpretasi. Peran hermeneutik ialah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau teks yang asing sama sekali agar menjadi milik kita yang hidup di zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda.

Ketika teks Al-Qur'an dipahami secara terpisah dari konteks sosial-historisnya, banyak aspek dari wacana sosial-psikologisnya yang hilang. Ketika sebuah wacana yang begitu kompleks dituliskan, penyempitan dan pengeringan makna dan nuansa tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, disinilah urgensi hermeneutika sebagai metodologi penafsiran yang dihadirkan dalam mendekati Al-Qur'an.

Selain itu, penulis juga menggunakan teori analisis wacana; yaitu studi tentang struktur pesan dalam suatu komunikasi; atau telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) suatu bahasa. Melalui analisis wacana, kita tidak hanya mengetahui isi teks yang terdapat pada suatu wacana, tetapi juga mengetahui pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan-pesan itu tersusun, dan dipahami. Analisis Wacana akan memungkinkan untuk memperlihatkan motivasi yang tersembunyi di belakang sebuah teks atau di belakang pilihan metode penelitian tertentu untuk menafsirkan teks.

Objek kajian atau penelitian analisis wacana pada umumnya berpusat pada bahasa yang digunakan sehari-hari, baik yang berupa teks maupun lisan. Jadi objek kajian atau penelitian analisis wacana adalah unit bahasa diatas kalimat atau ujaran yang memiliki kesatuan dan konteks yang eksis dikehidupan sehari-hari, misalnya naskah pidato, rekaman percakapan yang telah dinaskahkan, percakapan langsung, catatan rapat, dan sebagainya, dan pembahasan wacana pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan antara

konteks-konteks yang terdapat dalam teks. Pembahasan itu bertujuan menjelaskan hubungan antara kalimat atau antara ujaran (utterances) yang membentuk wacana.

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Palembang, tepatnya di beberapa pondok pesantren yang menjadi pusat keberadaan kiayi dan santri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan objek kajiannya adalah para kiayi dan santri. Yang dimaksud dengan kiayi di sini adalah mereka yang berada di suatu pesantren dalam kapasitas mereka sebagai pengajar; dan yang dimaksud santri adalah mereka yang dalam kapasitasnya sebagai murid. Penyebutan kiayi-santri dalam penelitian ini dipakai dalam kapasitas hubungan keilmuan semata; bukan dalam lingkup social dan budaya.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi survei lapangan dan wawancara terhadap kiayi-santri untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan dan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat politik yang ada dalam al-Qurann. Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk menjabarkan atau mengidentifikasi pandangan kiayi dan santri tentang ayat-ayat politik. Data yang akan digunakan diperoleh dari situasi apa adanya tanpa adanya intervensi dari pihak peneliti. Adapun informan dan responden dalam penelitian ini adalah para kiayi-santri dari pondok pesantren yang ada di kota Palembang yang diambil secara random.

B. Pembahasan

1. Hakikat Politik dalam Wacana Kiayi-Santri

Wacana para kiayi-santri tentang arti politik memang terlihat sangat praktis. Mereka mengartikan politik tidak lebih dari kata “kekuasaan” atau sistem pemerintahan. Sekalipun ada diantara kiayi-santri yang menganggap politik sebagai cara atau ilmu untuk mengatur masyarakat; tetapi wacana politik bagi mereka selalu diakhiri dengan kata kekuasaan atau system pemerintahan. Artinya, hakikat politik dalam pandangan mereka tidak berasal dari substansinya yaitu mengatur masyarakat, tetapi dari realitas politik yang terjadi secara global. Deskripsi ini setidaknya menunjukkan bahwa di kalangan kiayi-santri, politik difahami bukan dari hakikatnya yaitu cara mengatur masyarakat, tetapi dari realitas yang berkaitan dengan kekuasaan.

Tetapi ketika ditanya apakah politik sama dengan kekuasaan, wacana kiayi-santri menunjukkan dua hal yang berbeda. Ada yang beranggapan sama; ada juga yang beranggapan tidak sama. Yang beranggapan bahwa politik sama dengan kekuasaan didasari dari realitas

bahwa tujuan akhir dari politik adalah kekuasaan. Tetapi yang beranggapan bahwa politik tidak sama dengan kekuasaan melihat bahwa justru dalam kekuasaan-lah terdapat kewenangan untuk mengatur. Atau sederhananya dalam kekuasaan terdapat politik; tetapi dalam politik tidak terdapat kekuasaan.

Hal inilah yang mendasari penilaian bahwa dalam wacana tentang hakikat politik, kiayi-santri memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda. Kita juga bisa beranggapan bahwa hakikat politik yang ada dalam pemahaman kiayi-santri, dan mengarah kepada pemahaman yang realistis-praktis, muncul karena ketidaktahuan mereka tentang substansi makna kata “politik” itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan bahwa diantara kiayi-santri, tidak ada satupun yang mendasari defenisi tentang politiknya dari sudut bahasa.

Sekalipun demikian, baik kiayi atau santri, semuanya bersepakat bahwa di dalam AL-Quran memang terdapat ayat-ayat tentang politik. Misalnya tentang ayat-ayat musyawarah atau kepemimpinan yang terdapat di dalam al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka tidak melengkapi pemahaman mereka tentang arti politik dari sudut bahasa, tetapi bahwa ada masalah politik dalam Islam, mereka akui bersama.

2. Wacana Tafsir tentang Kepemimpinan

Masalah penting yang perlu dilihat kaktegorinya dalam wacana politik kiayi-santri adalah tentang kepemimpinan. Masalah ini ditanyakan melalui penggunaan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep imam, khalifah, ulil amri dan wali atau auliya; baik tentang makna katanya atau penggunaannya dalam al-Quran, ditanyakan kepada para kiayi-santri untuk mendapatkan wacana politiknya dalam konteks ke-Indonesiaan.

Dari persoalan yang ditanyakan kepada kiayi-santri tentang arti “pemimpin” dalam kata imam, khalifah atau ulil amri; hampir semua kiayi-santri menjawabnya dengan mengatakan bahwa kata-kata tersebut memang dapat diterjemahkan menjadi pemimpin. Tetapi ketika ditanyakan apakah arti pemimpin itu bisa disebut juga “presiden”; maka jawaban yang disampaikan terbagi menjadi dua bagian; (1) ada yang sepakat menyamakannya dengan kata presiden; dan (2) ada yang tidak sepakat menyamakannya dengan kata presiden.

Kesamaan kata imam, khalifah atau ulil amri dengan kata presiden, menurut wacana kiayi santri lebih disebabkan karena persoalan bahasa. Yaitu bahwa kata pemimpin pada zaman dahulu—setidaknya di negeri Arab—tempat asal kata tersebut, memang disebut dengan imam, khalifah atau ulil amri. Pada konteks ke-Indonesiaan, setidaknya pada konteks

demokrasi modern, istilah *imam*, *khalifah* atau *ulil amri* yang disamakan penyebutannya dengan kata “presiden”, didasari karena secara substansi adalah sama; yaitu pemimpin.

Pembedaan kata imam, khalifah atau ulil amri yang berarti “pemimpin” dalam arti “presiden”, muncul dalam anggapan kiayi-santri karena konteksnya yang berbeda. Bahwa istilah presiden memiliki konteks demokrasi modern; yang tidak sama dengan arti imam atau khalifah yang lebih bersifat teologis. Penggunaan kata “ulil amri” dalam konteks presiden lebih dipilih karena bersifat umum dan global; jadi bisa saja ulil amri adalah presiden. Apalagi kata imam atau khalifah yang muncul pada masa Rasul, mengandung arti bahwa kepemimpinan umat Islam yang berdasarkan al-Quran ini tidak sama maksudnya dengan kata presiden yang lebih berkonotasi modern dan kenegaraan saja.

Dari persoalan ini kita bisa melihat bahwa pemahaman para kiayi-santri tentang arti kata pemimpin, yang dalam al-Quran dipakai kata imam, khalifah atau ulil amri; menampilkan adanya pembedaan makna kata secara kontekstual. Bila diartikan dengan pemimpin umat, kata imam, khalifah atau ulil amri dapat diterima maknanya sebagai “pemimpin”; tetapi bila diartikan dengan pemimpin Negara, maka kata imam, khalifah atau ulil amri dapat diartikan dengan presiden. Kontekstualisasi kata-kata yang disebut oleh al-Quran seperti ini setidaknya memperlihatkan bahwa—dugaan sementara kita—pemahaman kiayi-santri terhadap ayat-ayat politik, atau terhadap istilah yang berkaitan dengan politik—selalu berkaitan dengan realitas politik yang terjadi pada masanya.

3. Wacana Tafsir tentang Pemimpin Non-Muslim

Wacana kiayi-santri tentang QS. Al-Maidah ayat 52 terkait larangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai *wali*, menunjukkan bahwa hampir semua kiayi-santri mengartikan “*awliya*” sebagai pemimpin. Ayat ini juga difahami bahwa hukumnya adalah haram karena dapat merusak akidah. Oleh karena itu, menurut kiayi-santri, orang muslim harus menjadi pemimpin, khususnya sebagai pemimpin Negara dan masyarakat.

Kriteria *wali* atau *auliya* (yang diterjemahkan sebagai “kawan” atau “pemimpin”) dari kalangan non-muslim, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 52, menarik untuk dikaji. Pertanyaan ini diajukan terkait realitas politik di Indonesia yang cukup memanas pasca terpilihnya Ahok sebagai gubernur Jakarta. Keterlibatan ulama yang melembaga dalam gerakan 212 dan munculnya kriteria calon pemimpin muslim dan non-muslim, selalu dialasi dengan QS. Al-Maidah ayat 52.

Dari hasil wawancara, kita melihat bahwa mayoritas kiayi-santri menolak seorang calon pemimpin yang berasal dari kalangan non-muslim. Setidaknya ada dua alasan pokok dari mereka yaitu; (1) karena mereka memang berbeda dalam keyakinan beragama; dan (2) karena di Indonesia Islam adalah agama mayoritas. Dari dua alasan ini, wacana tafsir kiayi-santri tentang QS. Al-Maidah ayat 52 menunjukkan bahwa prinsip keyakinan atau akidah adalah pertimbangan utama kiayi-santri; terlebih bahwa dari prinsip ini memunculkan alasan-alasan lain. Misalnya, bahwa memang al-Quran mengatakan demikian; atau karena adanya kekhawatiran non-muslim akan mempengaruhi dan merubah keimanan orang muslim. Kekhawatiran ini tentu saja bersifat historis; dalam arti lebih dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis. Sekalipun ada diantara mereka yang membolehkan non-muslim sebagai pemimpin dengan syarat jika tidak ada muslim yang mampu.

Karena itulah ketika ditanya apakah dengan memilih non-muslim sebagai pemimpin bisa menjadikan seseorang bagian dari mereka; maka ada beberapa kiayi-santri yang berbeda pendapat. Sebagian besar memang menerima anggapan tersebut, tetapi ada juga yang tidak menerima dengan alasan realistis; bahwa belum tentu orang Islam yang memilih non-muslim sebagai pemimpin akan menjadi bagian dari mereka.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa persoalan kriteria pemimpin Negara, baik karena calon pemimpin itu dari kalangan muslim atau non-muslim, tidak dilihat dari aspek kualitas atau profesionalitas mereka, tetapi dari aspek teologis dan ajaran normative. Pendek kata, kriteria kiayi-santri tentang siapa pemimpin di Indonesia pada saat ini memang ditentukan melalui factor agama bukan kinerja.

4. Wacana Tafsir tentang Konsep Musyawarah

Pertanyaan tentang musyawarah diajukan untuk melihat wacana kiayi-santri tentang ayat al-Quran surat Ali Imron ayat 159 yang berbunyi, “*Dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam suatu urusan...*”. Untuk memahami wacana kiayi-santri tentang ayat ini, penulis juga bertanya tentang kesamaan konsep musyawarah dengan demokrasi dalam arti bebas berpendapat.

Hampir semua kiayi-santri sepakat bahwa musyawarah artinya adalah berunding atau berdiskusi demi mencapai kesepakatan bersama. Wacana ini jelas terlihat dari penggunaan kata musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia dan dipakai dalam kehidupan masyarakat. Penekanan musyawarah sebagai arti diskusi mendapat penekanan etika bahwa ia harus dilakukan dengan hati yang lembut. Karena itu, ketika dihubungkan arti musyawarah

dengan bebas berpendapat, wacana kiayi-santri juga melihat bahwa bebas berpendapat juga perlu dilakukan dengan tidak menjatuhkan lawan bicara. Hal ini mengindikasikan bahwa para kiayi-santri lebih melihat musyawarah sebagai aspek komunikasi.

Ketika dikaitkan dengan arti demokrasi, wacana tentang arti musyawarah tidak selalu sama. Ada sebagian kiayi-santri yang menyamakannya dengan demokrasi, dan sebagian justru menganggapnya berbeda dengan demokrasi. Mereka yang berbeda, melihat bahwa arti demokrasi mengarah kepada bentuk dan sistem pemerintahan. Anggapan ini jelas menunjukkan bahwa wacana kiayi-santri tentang arti demokrasi selalu berhubungan dengan politik, dalam arti sistem pemerintahan; yang tidak sama dengan konsep musyawarah.

5. Wacana tentang Negara yang Adil

Masalah penting yang muncul dalam wacana kiayi-santri tentang ayat-ayat politik dalam al-Quran adalah ciri-ciri negara yang adil. Wacana ini ditanyakan berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, “*Berbuatlah adil; karena ia lebih dekat kepada ketakwaan*”. Dalam wacana ini, interpretasi kiayi-santri tentang ciri Negara adil memiliki kesamaan satu sama lain; sekalipun diungkapkan dalam kalimat yang berbeda.

Negara yang adil dalam wacana kiayi-santri, terlihat dari dua hal pokok yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dua hal ini mendominasi wacana tafsir kiayi-santri yang dikaitkan dengan masalah keadilan Negara. Dari tema ini kita bisa menduga bahwa wacana kiyai-santri yang lebih melihat ciri Negara yang adil itu pada perlindungan HAM dan kesejahteraan rakyat, merupakan tema yang muncul sejak beberapa tahun ini di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilres) tahun 2019. Sebagaimana diketahui, isu pemerintah zalim dalam bentuk kriminalisasi ulama; dan isu ketimpangan ekonomi rakyat akibat dominasi asing dan aseng, menjadi isu politik yang panas dan menyebar ke masyarakat luas. Sedangkan wacana lain yang muncul berkisar pada masalah gender, perlunya penerapan ajaran Islam dan keharusan pemerintah berpihak kepada rakyat, menjadi ciri Negara yang adil yang diharapkan oleh kiayi-santri.

Dari ciri-ciri Negara yang adil ini, setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita; *pertama*, wacana kiayi-santri ini lebih bersifat idealis; dalam arti sesuai dengan tujuan umum pembentukan Negara; *kedua*, wacana kiayi-santri ini juga menggambarkan bagaimana kondisi objektif persoalan Negara tentang masalah HAM dan kesejahteraan rakyat.

6. Wacana Tentang Perselisihan Umat

Wacana perselisihan umat yang ada dalam ayat-ayat al-Quran menarik untuk dicermati dalam interpretasi kiayi-santri. Dalam wacana ini, para kiayi-santri memberikan interpretasi mereka terhadap ayat yang mengatakan, “*Dan apa yang kalian perbedakan di dalamnya tentang sesuatu maka hukumnya kembali kepada Allah*”. Bagi kiayi-santri, kembali kepada Allah diartikan dengan cara merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Bahkan kembali kepada Allah juga dapat dilakukan dengan cara bermusyawarah dan mencari jalan tengah dari setiap perselisihan. Pada sisi ini, kiayi-santri melihat hubungan antara al-Quran sebagai kitab hokum dan masalah yang muncul dalam realitas masyarakat. Dengan menerima al-Quran dan hadis sebagai pedoman hokum, maka itulah yang menjadi inti dari ayat tersebut.

Perselisihan dalam masyarakat, khususnya tentang masalah politik, setidaknya juga dilihat kiayi-santri sama dengan masalah hokum lain. Bagi kiayi-santri, kembali kepada Allah jika ada masalah politik yang diperselisihkan, maka hal itu dapat dilakukan dengan cara merujuknya sesuai dengan apa yang ada di dalam al-Quran dan hadis. Bagi sebagian kiayi-santri lain, jika hokum Negara dapat didahulukan daripada hokum agama, maka itu juga bisa diterima. Sebab tidak semua masalah politik harus diselesaikan dengan pendekatan agama.

Melihat kenyataan ini, kita bisa mengatakan bahwa memang hampir semua kiayi-santri melihat masalah politik yang terjadi dalam Negara kita, dari perspektif agama. Perselisihan politik, apapun bentuknya, akan dinilai berdasarkan norma-norma agama, sebagaimana dalam al-Quran dan hadis. Agama dengan demikian menjadi indikator untuk menentukan mana politik yang baik dan buruk. Jadi di sini, kita bisa menduga bahwa kiayi-santri yang banyak menggunakan agama sebagai factor dalam perselisihan politik adalah mereka yang sering disebut masuk dalam kriteria politik identitas.

Tetapi bukan saja perselisihan yang berada dalam wilayah politik yang menjadi focus bagi kiayi-santri. Ketika ditanya tentang perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat muslim, wacana tafsir kiayi-santri melihatnya dengan sangat beragam. Sebagian besar mencoba memberikan alternative untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat dengan cara seperti menciptakan keadilan dan kedamaian, musyawarah mencari jalan tengah, mempertahankan solidaritas dan partisipasi masyarakat dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam wacana tafsir kiayi-santri, norma-norma agama dapat digunakan secara praktis untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi masyarakat.

7. Wacana Tentang Peran Negara dalam Perselisihan di Masyarakat

Wacana penting yang berkaitan dengan perselisihan di masyarakat adalah tentang peran Negara. Wacana ini dimunculkan terkait pemahaman kiayi-santri tentang perselisihan yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang disinggung oleh al-Quran dalam berbagai ayat tentang perselisihan. Sekalipun al-Quran secara lugas mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi bagaimana Negara berperan dalam perselisihan itu sangat perlu digali dari wacana tafsir kiayi-santri.

Wacana umum kiayi-santri tentang peran Negara dalam perselisihan umat adalah berkaitan dengan aspek fungsi. Negara harus menjadi fasilitator yang mampu mendamaikan berbagai pihak yang sedang bertikai. Fasilitasi tersebut dalam wacana kiayi-santri dapat dilakukan dengan musyawarah atau penguatan kesadaran social. Bahkan, keterlibatan ulama sebagai fasilitator dapat saja dilakukan oleh Negara terutama karena kedudukan mereka sebagai pemuka agama. Sebagai fasilitator, negara juga harus mampu menjadikan musyawarah sebagai alternative penting dalam menyelesaikan perselisihan, disamping menerapkan hukum atau peraturan yang berlaku.

Deskripsi tentang fungsi Negara sebagai fasilitator bagi masyarakat memang menarik untuk dilihat sebagai wacana kiayi-santri. Negara dipandang mampu mendamaikan masyarakat karena melalui kekuasaannya pihak-pihak yang bertikai akan tunduk kepada hukum. Tetapi penerapan hukum ketika terjadi perselisihan, yang tidak diutamakan karena ulama-kiayi lebih mendahulukan aspek musyawarah; perlu dilihat sebagai salah satu factor kurangnya kepercayaan kiayi-santri terhadap fungsi Negara itu sendiri. Bahwa perselisihan harus dikembalikan kepada al-Quran-Hadis, dan pelibatan ulama dalam proses penyelesaiannya; menunjukkan bahwa wacana kiayi-santri masih bersifat normative dan tidak praktis.

8. Wacana Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi wacana tafsir bagi kiayi-santri dengan cara mengajak manusia kepada perbuatan baik. Dalam pandangan kiayi-santri, setiap muslim harus mampu menjadi penyeru yang baik; yang dapat merubah perilaku manusia ke arah perbuatan yang diridhoi Allah swt. Tetapi yang menarik, adalah ketika wacana tafsir kiayi-santri tentang konsep *amar ma'ruf nahi munkar* ini dihubungkan dengan posisi Negara. Bagi kiayi-santri, Negara harus mampu membuat kebijakan dan peraturan yang dapat mensejahterakan rakyat. Melalui konsep ini juga Negara dapat menciptakan rasa aman dan rasa keadilan kepada seluruh penduduk. Untuk mewujudkan ini, kiayi-santri melihat bahwa keberadaan pemimpin

Negara yang berasal dari kalangan muslim menjadi sangat diperlukan untuk menjamin konsep *amar ma'ruf nahi munkar* berjalan dengan baik. Di samping itu, yang paling penting bagi kiayi-santri, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dijalankan sebagaimana disebutkan dalam al-Quran, harus diatur melalui nilai-nilai yang ada dalam al-Quran dan hadis Nabi.

C. Kesimpulan

Penelitian ini melihat bahwa wacana tafsir kiayi-santri terhadap ayat-ayat politik yang ada dalam al-Quran difahami secara kontekstual khususnya jika dihubungkan dengan kondisi politik yang sedang terjadi di Indonesia. Kontekstualisasi ini terjadi dikarenakan kiayi-santri melihat politik sebagai cara untuk mencapai kekuasaan. Oleh karena itu, ayat-ayat yang berbicara tentang masalah politik, seperti konsep kepemimpinan dan keadilan social; tidak difahami sebagai ayat yang mengandung pesan-pesan global, tetapi justru parsial.

Secara kategorisasi, wacana tafsir kiayi-santri tentang ayat-ayat politik juga dibicarakan secara normative; dalam arti harus selalu berlandaskan apa yang sudah ada dalam al-Quran dan Hadis. Dari kriteria pemimpin non-muslim, keadilan social sampai masalah hokum, semuanya selalu dikembalikan kepada al-Quran dan Hadis. Hal ini disebabkan karena santri-kiayi melihat politik merupakan lawan dari agama; yang dari agama itulah nanti akan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 3

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung, Mizan, 1996

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta. LKiS, 1994

Al-Qurthubiy, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, jilid 6, Beirut, Ar-Risalah, 2006

Rahmatullah, Muhammad, “*Kepemimpinan Khalifah Abubakar al-Shiddiq*”, dalam Jurnal Khatulistiwa, Journal of Islamic Studies, vol. 4 No. 2 September 2014, hal. 197-204